
ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DALAM PENENTUAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT. SARWA KARYA WIGUNA PALEMBANG

Bambang Utoyo, Yeni Widyanti

Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial Humaniora
Universitas Bina Darma Palembang

Bambang Utoyo @binadarma.ac.id,
Jl. A. Yani No. 3, Palembang 30624, Indonesia

Abstract

This study aims to find out if fiscal corrections in the context of calculating income tax are in accordance with the tax regulations that apply at PT.Sarwa Karya Wiguna in 2022. The research paradigm uses a qualitative descriptive research method because in its implementation it includes data, analysis and interpretation of meaning and data obtained. Data techniques obtained through interview techniques, documentation. The results showed that the fiscal financial reports and commercial financial reports were almost the same except for two accounts that underwent positive fiscal corrections, namely administration costs & bank interest and negative fiscal corrections of bank interest income. In the framework of calculating the income tax payable in the fiscal financial statements, income and expenses that are not related to the company's operational activities are not included or not reported in profit or loss. So based on the results of the analysis of fiscal financial statements in the company PT. Sarwa Karya Wiguna Palembang is in accordance with applicable tax regulations.

Keywords: Fiscal Correction, Financial Statements and Income Tax

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koreksi fiskal dalam perhitungan pajak penghasilan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada PT. Sarwa Karya Wiguna pada tahun 2022. Model penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena didalamnya meliputi data, analisis dan interpretasi makna serta data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan perpajakan dan laporan keuangan komersial hampir sama hanya saja kedua akun tersebut mengalami penyesuaian positif terhadap beban administrasi dan bunga bank serta mengalami penyesuaian negatif terhadap penghasilan pajak bunga. Sebagai bagian dari penghitungan pajak penghasilan terutang dalam laporan keuangan perpajakan, penghasilan dan beban yang tidak berkaitan dengan usaha perusahaan tidak dimasukkan atau diakui dalam laba rugi. Jadi berdasarkan hasil analisis laporan keuangan perpajakan PT. Sarwa Karya Wiguna Palembang mematuhi peraturan perpajakan yang sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku..

Kata kunci : Koreksi Fiskal, Laporan Keuangan dan Pajak Penghasilan

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah kewajiban orang pribadi atau badan yang dipungut pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang (dengan kekuatan) dengan tidak mendapatkan kontraprestasi individual oleh pemerintah, dan dari pajak tersebut diperuntukkan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah. (IAI, 2013: 2.) Pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi yaitu orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar pajak. Menurut Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Subjek pajak bentuk usaha tetap memiliki perlakuan pajak yang sama dengan subjek pajak badan. (IAI dalam Undang-undang Perpajakan 2013: 5). Yang menjadi objek pajak dalam Pada pasal 4 ayat 1 Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang dimiliki atau diperoleh Wajib Pajak, baik luar negeri maupun di dalam negeri. (IAI dalam Undang-undang Perpajakan 2013: 13)

Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. (Agoes. 2010). Dilakukannya koreksi fiskal karena adanya perbedaan dalam Konsep biaya: Setiap biaya atau pengeluaran ekonomi yang dilakukan untuk menghasilkan pendapatan dapat dianggap sebagai beban akuntansi. Konsep pengeluaran, bagaimanapun, hanya terbatas pada biaya untuk memperoleh, mengumpulkan, dan memelihara pendapatan untuk tujuan perpajakan. Oleh karena itu, suatu biaya yang telah dicatat menurut perhitungan mungkin tidak dapat diperhitungkan untuk keperluan pajak. Berdonasi adalah salah satu contohnya. Donasi akan menjadi biaya bagi perusahaan; secara finansial, itu adalah biaya, tetapi untuk pajak sumbangan tidak boleh dianggap sebagai biaya.

Dengan perbedaan tersebut mengakibatkan selisih antara laba/rugi usaha dengan laba/rugi kena pajak. Oleh karena itu, untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang, perlu dilakukan penyesuaian hasil penghitungan pajak. PT. Sarwa Karya Wiguna yang beralamat di Jalan Abdul Rozak Celentang Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni, bergerak dibidang jasa general kontraktor dan agen resmi loket payment point online banking (PPOB).

Dalam melakukan usahanya tersebut perusahaan membuat laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku, itu bisa dilihat dari laporan keuangan perusahaan pada tahun 2022 dan perusahaan telah melaporkan SPT Tahunannya yaitu terdapat koreksi positif dan koreksi negatif dan mengakibatkan PPh yang harus dibayar (kurang). Dari laporan perhitungan 2022 tersebut, peneliti menganalisa kembali apakah perusahaan telah menerapkan laporan fiskal sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak nomor 36 tahun 2008 dengan baik dan benar sesuai peraturan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis koreksi fiskal dalam perhitungan pajak penghasilan pada PT. Sarwa Karya Wiguna Palembang apakah sudah memenuhi peraturan pajak yang berlaku.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian dilakukan di PT. Sarwa Karya Wiguna Jl. Abdul Rozak Celentang Bukit Sangkal Kec Kalidoni.

2.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian deskriptif kualitatif karena dalam pelaksanaannya meliputi data, analisis dan interpretasi tentang data yang diperoleh. Metode deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. (Anwar Sanusi, 2011:115)

Penelitian kualitatif, yang berbasis pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk melakukan penelitian pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawanya adalah eksperimen). Peneliti adalah instrumen kunci dalam penelitian ini, dan pengambilan sampel sumber dan data dilakukan secara purposive dan snowball. Teknik pengumpulan triangulasi (gabungan) digunakan, dan analisis data dilakukan secara induktif atau kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian kualitatif menekankan pentingnya makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2016: 14)

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan penelitian ini bersumber dari dua bagian yaitu data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan dicatat oleh peneliti, sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan diakses oleh orang lain. Peneliti hanya dapat menggunakan data skunder sesuai kebutuhan. Data sekunder tersedia di lokasi penelitian dan di luar lokasi penelitian. Data sekunder internal tersedia di lokasi penelitian, dan data sekunder eksternal tersedia di luar lokasi penelitian. (Anwar Sanusi, 2011:104.)

2.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian, pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. (Anwar Sanusi, 2011:105.)

Interview/Wawancara yaitu mengadakan wawancara dalam hal ini dengan pimpinan dan staff untuk menggali informasi yang dibutuhkan peneliti, terkait dalam hal masalah, laporan dan lain sebagainya.

Dokumenter yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan arsip dan dokumen-dokumen dari perusahaan yang bersangkutan, seperti struktur organisasi, laporan keuangan, rekapitulasi personalia dll.

2.5 Metode Analisis Data

Sugiyono (2013) mengatakan bahwa metode ini digunakan untuk menganalisis hasil penelitian, tetapi tidak untuk menarik kesimpulan yang lebih luas tentang penelitian ini.

1. Mendapatkan data laporan keuangan PT. Sarwa Karya Wiguna seperti neraca, laporan laba rugi, rekonsiliasi pajak, laporan aktiva tetap.
2. Memeriksa setiap akun laporan keuangan perusahaan, terutama laporan laba rugi yang mencakup pendapatan, harga pokok penjualan, biaya umum dan administrasi, pendapatan, dan biaya lainnya berdasarkan data yang dikumpulkan oleh penulis dari perusahaan.
3. Memeriksa kelengkapan setiap laporan laba rugi terhadap peraturan perpajakan yang berlaku untuk menentukan apakah diperlukan penyesuaian pajak dan berapa besar penyesuaian jika ditemukan.
4. Memeriksa aktiva tetap perusahaan setelah penyusutan aktiva tetap komersial.

5. Menghitung penyusutan pajak atas asset menggunakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk menentukan besarnya pajak yang disesuaikan atas beban penyusutan asset tetap.
6. Menyelesaikan penyesuaian pajak atas selisih tetap dan selisih waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
7. Menghitung laba kena pajak dan menentukan besarnya pajak penghasilan badan yang terutang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.2.1 Laporan Keuangan Perusahaan

Bagian ini akan menampilkan data yang diperoleh dari PT. Sarwa Karya Wiguna Palembang. Data yang akan ditampilkan adalah Laporan Keuangan PT. Sarwa Karya Wiguna Palembang tahun 2022.

Tabel 4.1
PT. Sarwa Karya Wiguna Palembang Laporan Laba Rugi
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022

URAIAN	
PENDAPATAN USAHA	58,743,124,015.18
HARGA POKOK PENJUALAN	57,519,106,005.75
LABA KOTOR	1,224,018,009.43
BIAYA OPERASI	-
Biaya Gaji	3,894,460,963.00
Biaya Jamsostek	448,945,101.00
Biaya Sewa	147,500,000.00
Biaya Asuransi	52.249.220,00
Biaya Bunga Leasing Kendaraan	298,528,653.72
Biaya Bunga Pinjaman Pihak III	272,051,029.00
Biaya Penyusutan Aset Tetap	652,827,584.90
Biaya Administrasi Umum	745,398,800.00
Biaya Audit	15,300,000.00
Biaya THR	223,906,210.00
Biaya Minyak & Transport	234,137,159.00
Biaya Pengembangan usaha	97,279,998.00
Biaya Pemeliharaan	225,110,200.00
Biaya Pendidikan	6,400,000.00
TOTAL BIAYA USAHA	7,261,845,698.62
	6,037,827,689.19
PENDAPATAN DAN BEBAN LUAR USAHA	-
PENDAPATAN BUNGA BANK	686,216,250.00
PENDAPATAN LAINNYA	1,247,829,690.31
BIAYA ADMINISTRASI & BUNGA BANK	(1,238,608,829.69)
PENDAPATAN & (BEBAN) LAIN-LAIN	695,437,110.62
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK	5,342,390,578.57

Dari data yang ada, dapat dilihat bahwa PT. Sarwa Karya Wiguna Palembang, belum melakukan penyesuaian untuk membayar pembayaran pajak. Dari data yang ada

terlihat bahwa PT. Sarwa Karya Wiguna Palembang mengalami keuntungan sebesar Rp. 5,342,390,578.57. namun data hanya berdasarkan laporan keuangan yang ada tanpa rekonsiliasi. Hal ini menunjukkan PT. Sarwa Karya Wiguna Palembang sesuai laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan bukan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

Data PT. Sarwa Karya Wiguna Palembang yaitu laporan keuangan perusahaan, khususnya laporan laba rugi, maka dilakukan rekonsiliasi (koreksi) atas laporan laba rugi tersebut menjadi laporan laba rugi kena pajak, untuk menentukan laba kena pajak sebagai bagian dari penghasilan. pernyataan. perhitungan. pajak badan (PPH) berdasarkan data-data yang diperoleh sehubungan dalam penelitian ini.

4.2.2 Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi PT. Sarwa Karya Wiguna Palembang Tahun 2022

Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/ laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dengan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap (*permanent differences*) dan beda waktu (*timing differences*) (Siti Resmi 2008:339).

Laporan keuangan PT. Sarwa Karya Wiguna Palembang yang dimana laporan keuangan ini peneliti akan analisis atau melakukan koreksi fiskal sehingga menghasilkan suatu laporan keuangan fiskal, laporan keuangan fiskal inilah yang akan dijadikan dasar untuk menghitung pajak penghasilan terutang. Karena sebagaimana diketahui bahwa antara laporan keuangan komersil dan laporan keuangan fiskal itu ada perbedaan dari hasil analisis ini atau hasil dari koreksi ini yang mana menghasilkan berapa PPh terutang yang akan perusahaan bayarkan,. Sebagai bentuk rekomendasi menyeluruh tentang koreksi fiskal laporan keuangan komersil dalam perencanaan pajak penghasilan terutang Berikut laporan rekonsiliasi laporan laba rugi PT. Sarwa Karya Wiguna Palembang.

Tabel 4.2
PT. Sarwa Karya Wiguna Palembang Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Berakhir 31 Desember 2022

URAIAN	SALDO KOMERSIL	KOREKSI FISKAL		SALDO FISKAL
		POSITIF	NEGATIF	
PENDAPATAN USAHA	58,743,124,015.18			58,743,124,015.18
HARGA POKOK PENJUALAN	57,519,106,005.75			57,519,106,005.75
LABA KOTOR	1,224,018,009.43			1,224,018,009.43
BIAYA OPERASI	-			-
Biaya Gaji	3,894,460,963.00			3,894,460,963.00
Biaya Jamsostek	448,945,101.00			448,945,101.00
Biaya Sewa	147,500,000.00			147,500,000.00
Biaya Asuransi	52.249.220,00			52.249.220,00

Bambang Utoyo, Bambang Utoyo, Yeni Widyanti			UBD
Biaya Bunga Leasing Kendaraan	298,528,653.72		298,528,653.72
Biaya Bunga Pinjaman Pihak III	272,051,029.00		272,051,029.00
Biaya Penyusutan Aset Tetap	652,827,584.90		652,827,584.90
Biaya Administrasi Umum	745,398,800.00		745,398,800.00
Biaya Audit	15,300,000.00		15,300,000.00
Biaya THR	223,906,210.00		223,906,210.00
Biaya Minyak & Transport	234,137,159.00		234,137,159.00
Biaya Pengembangan usaha	97,279,998.00		97,279,998.00
Biaya Pemeliharaan	225,110,200.00		225,110,200.00
Biaya Pendidikan	6,400,000.00		6,400,000.00
TOTAL BIAYA USAHA	7,261,845,698.62		7,261,845,698.62
TOTAL LABA USAHA	6,037,827,689.19		6,037,827,689.19
PENDAPATAN DAN BEBAN LUAR USAHA			
PENDAPATAN BUNGA BANK	686,216,250.00	686.216.250.00	-
PENDAPATAN LAINNYA	1,247,829,690.31		1,247,829,690.31
BIAYA ADMINISTRASI & BUNGA BANK	(1,238,608,829.69)	97,763,267.00	(1,140,845,562.69)
TOTAL PENDAPATAN DAN BEBAN LUAR USAHA	695,437,110.62		106,984,127.62
LABA RUGI SEBELUM PAJAK	5,342,390,578.57	97,763,267.00	686,216,250.00
			4,558,411,061.57

Berdasarkan tabel 4.2 di atas bahwa koreksi fiskal terlihat didalam laporan laba rugi PT. Sarwa Karya Wiguna Palembang dari 1 Januari hingga 31 Desember 2022. Ada 1 akun koreksi positif dan satu akun koreksi negatif. Akun pajak penyesuaian positif dan negatif masing-masing memiliki beban yang tidak dapat diakui sebagai beban yang dapat mengurangi pendapatan oleh undang-undang pajak. Jadi sebagai bagian dari rekonsiliasi pajak PT. Sarwa Karya Wiguna Palembang atas laba dan rugi kena pajak, akun-akun tersebut perlu dilakukan penyesuaian dan dilakukan koreksi fiskal positif yang akan meningkatkan laba kena pajak PT. Sarwa dari Wiguna Palembang. Akun koreksi positif pajak yaitu akun beban administrasi dan bunga bank disesuaikan positif sebesar Rp. 97.763.267,00. dan pendapatan bunga bank sebesar Rp 686.216.250,00.

Beban administrasi dan rekening bunga bank perlu disesuaikan secara positif, karena pada laporan keuangan terlampir dan informasi yang diperoleh, rekening dengan rekening beban bunga bank termasuk beban pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 sebesar

Rp. 97.763.267,00. Sesuai dengan peraturan pajak penghasilan yang berlaku saat ini yang diatur dalam UU No. Pasal 2 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) huruf a tentang Pajak Penghasilan, jelas bahwa ini adalah biaya yang tidak dapat dikurangkan dari jumlah penghasilan, sehingga harus disesuaikan secara positif. Oleh karena itu, pada saat rekonsiliasi pajak atas biaya administrasi dan rekening bunga bank pada laporan laba/rugi, maka jumlah biaya PPh menurut Pasal 4 ayat 2 dimasukkan ke dalam beban bunga bank, yaitu sebesar Rp. 97.763.267,00. Kemudian rekening lain yang juga perlu disesuaikan secara negatif adalah rekening pendapatan bunga bank sebesar Rp 686.216.250,00 disesuaikan negatif karena tidak diakui sebagai penghasilan dalam akun pajak. Pentingnya penyesuaian pajak adalah untuk menghindari kesalahan dalam penghitungan pajak. Karena dalam bisnis, jika terjadi kesalahan nominal maka dapat merugikan bisnis tersebut. Untuk itu keakuratan rekonsiliasi fiskal ini memerlukan data, transaksi, dan penyesuaian pendapatan yang akurat.

4.2.3 Perhitungan pajak penghasilan terhutang PT. Sarwa Karya Wiguna Palembang

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPh, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan yang dapat dikenakan pajak bersifat final diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh, sedangkan penghasilan yang berhubungan dengan non objek pajak diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh. Dalam perhitungan PPh khususnya bagi wajib pajak badan, dasar perhitungan untuk menentukan besaran Pajak Penghasilan terhutang disebut Penghasilan Kena Pajak yang dapat dikurangi biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU PPh dan biaya yang tidak boleh menjadi pengurang sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU PPh.

Tabel 4.3 Tarif Pajak bagi Wajib Pajak Badan

Tahun berlakunya tarif	Dasar hukum PPh Badan	Tarif PPh Badan	Keterangan
2010-2019	UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2) huruf a	25%	Tarif yang diatur dalam Undang-Undang tersebut berlaku hingga tahun pajak 2020 dan berakhir dengan keluarnya Undang-Undang No.2 Tahun 2020.

Tahun berlakunya tarif	Dasar hukum PPh Badan	Tarif PPh Badan	Keterangan
2020 – 2021	UU No. 2 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) huruf a	22%	Tarif PPh Badan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat 1 huruf b UU PPh turun pada tahun pajak 2020 dan 2021 setelah UU tersebut diterbitkan.
2022	UU No. 2 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) huruf b	20%	Tarif PPh Badan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 1 huruf b UU PPh akan turun dari tahun pajak 2022 setelah UU tersebut diterbitkan.

Perhitungan Pajak Penghasilan terhutang PT. Sarwa Karya Wiguna Palembang dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini:

Tabel 4.4 Perhitungan Pajak Penghasilan terhutang PT. Sarwa Karya Wiguna Palembang

Penjualan bruto	Rp 58.743.124.015,18
Jumlah biaya	Rp 57.519.106.005,75
Penghasilan neto komersial	Rp 5.342.390.578,57
Koreksi fiskal positif	Rp 97.763.267,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 4.558.411.061,57
Jumlah PKP yang memperoleh fasilitas	$(Rp4,800,000,000 : Rp.58,743,124,015.18) \times 4.558.411.061.57$ Rp 372.475.476,28
Jumlah PKP yang tidak memperoleh fasilitas	$Rp.4.558.411.061,57 - Rp.372.475.476,28$ Rp 4.185.935.585,29
PPh Badan Terutang Tahun 2022	$(50\% \times 22\%) \times Rp.4.558.411.061,57$ Rp 501.425.216,77
	$22\% \times (Rp 372,475,476.28)$ Rp 81.944.604,78
	Rp 81.944.604,78
Jumlah PPh Badan Terutang Tahun 2022	Rp 81.944.604,78

Untuk menghitung lebih jelas besarnya pajak pendapatan yang terutang pada tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Kena Pajak sebesar Rp 4.558.411.061,57.
2. Perhitungan penghasilan kena pajak bagian (a) Sebelum menghitung PPh terutang maka di buatkan perhitungan untuk menghitung penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas potongan dan Penghasilan Kena Pajak yang tidak

mendapat fasilitas potongan. Untuk yang mendapatkan fasilitas yaitu Rp.4.8000.000.000 dibagikan dengan peredaran bruto dan dikalikan dengan penghasilan kena pajak maka Jumlah PKP yang memperoleh fasilitas berjumlah Rp. 372.475.476,28

3. Untuk yang tidak mendapatkan fasilitas pada yaitu pada poin dua bagian (b) penghasilan kena pajak dikurangi dengan PKP yang mendapatkan fasilitas potongan maka total penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan fasilitas berjumlah Rp. 4.185.935.585,29.
4. Perhitungan pajak pendapatan badan yang terutang tahun 2022 adalah 50% dikalikan 22% kali PKP setara dengan Rp 501.425.216,77
5. Perhitungan Jumlah PPh Badan Terutang Tahun 2022 yaitu 22% dikalikan dengan PKP yang mendapat fasilitas atau potongan berjumlah Rp 81.944.604,78.

Tabel 4.5 Perhitungan PPh Pasal 25

PPH Terutang		Rp. 81.944.604,78
Dikurangi Kredit Pajak		-
-PPh Pasal 21		
-PPh Pasal 22		
-PPh Pasal 23		
-PPh Pasal 24		
-PPh Pasal 25		Rp. 440,573,430.11
PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29)		Rp. 12,923,487,283
Perhitungan PPh pasal 25 untuk tahun berjalan		
PPh Terutang (Dasar Pengenaan Pajak)		Rp. 12,923,487,283
PPh Pasal 25	Rp. 12,923,487,283/12	Rp. 1,076,957,273.61

Berdasarkan tabel 4.4 diatas terlihat, penghitungan kekurangan pajak penghasilan (PPh Pasal 29) dapat dilakukan dengan cara mengurangi jumlah pajak penghasilan yang terutang dengan cara mencampurkan pemotongan pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan. pajak bagian 24 dan pajak penghasilan bagian 25 atau pajak penghasilan di bayar, PPh 25, PPh yang terutang dikurangi kredit pajak kecuali PPh Bagian 25 dibagi 12 yaitu PPh 25 Rp. 1 076 957 273,61.

4.2.4 Daftar Penyusutan dan Amortisasi PT. Sarwa Karya Wiguna

Perhitungan penyusutan terdapat dua metode yaitu menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun. Pada PT. Sarwa Karya Wiguna Palembang hanya menerapkan metode garis lurus sebagai berikut :

Tabel 4.6
Daftar Penyusutan dan Amortisasi

Kelompok/ Jenis Harta	Bulan/Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Nilai Sisa Buku Fiskal Awal Tahun	Metode Penyusutan/ Amortisasi	Penyusutan/Amort. Fiskal Tahun ini
A. AKTIVA TETAP HARTA BERWUJUD					
Kelompok 1					
Tanah dan Kendaraan					
Mobil	07/2005	875,440,000	727,890,625	GL	55,312,500
Motor	09/2005	75,440,000	62,647,500	GL	7,930,000
Tanah Luas 1570m ³	01/2007	1.494.769.086.68	1.494.769.086.68	GL	26,881,250
Kelompok 2					
Peralatan Usaha					
Insulation Tester	06/2005	56,800,000	36,640,000		
Solder (Patri)	06/2005	16,800,000	12,462,500	GL	850,000
Tang (Pliers)	06/2005	22,500,000	17,890,625	GL	5,312,500
Testpen	06/2005	7,650,000	5,020,313	GL	956,250
Obeng (Screw- Drivers)	06/2005	3,400,000	2,231,250	GL	425,000
Kunci Inggris (Adjustable Wrench)	06/2005	3.255,000	2,167,344	GL	31,875
Cutter (Pemotong)	06/2005	1,275,000	836,719	GL	159,375
Isolasi	06/2005	3,144,500	2,194,829	GL	18,063
Tas pinggang (Bag Pouch)	06/2005	34,212,500	27,139,454	GL	26,563
Multitester	06/2005	11.765,000	9,502,032	GL	95,625
Tang Ampere	06/2005	4.212,500	3,139,454	GL	26,563
ELCB Tester	07/2009	21,700,000	11,115,625	GL	212,500
Kelompok 3					
Peralatan Kantor					
Komputer + Print	06/2005	42,975,000	21,929,688	GL	-
Meja Meeting	06/2005	61,445,000	34,551,563	GL	-
Kursi Meeting	07/2009	11,700,000	6,531,250	GL	-
Meja Kantor	07/2009	21,360,000	11,425,000	GL	-
Kursi plastik	07/2009	4.520,200	1,162,563	GL	-
Meja Direktur + Kursi	07/2005	12,550,000	6,796,875	GL	-
Biaya pra operasional	07/2009	52,125,000	36,664,063	GL	-
Kelompok 4					
BANGUNAN					
Permanen	02/2003	1.425,000,000	1,302,812,500	GL	71,250,000
Penyusutan Fiskal					169,488,064
Penyusutan Komersial					169,488,064
Selisih Penyusutan					-

Pada Tabel 4.5 Di atas, pajak PT. Sarwanya Wiguna hanya menggunakan metode linier untuk menghitung total aset tetapnya. Penyusutan pajak dan penyusutan komersial adalah samaa dan tidak ada perbedaan penyusutan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada perusahaan PT. Sarwa Karya Wiguna Palembang laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial Sarwa Karya Wiguna Palembang hampir sama kecuali dua akun yang disesuaikan dengan pajak positif yaitu beban administrasi dan bunga bank dan bunga bank yang disesuaikan dengan pajak, dan pendapatan negatif. Sebagai bagian dari penghitungan pajak penghasilan terutang dalam laporan keuangan perpajakan, penghasilan dan beban yang tidak berkaitan dengan usaha perusahaan tidak dimasukkan atau diakui dalam laba rugi. Jadi berdasarkan hasil analisis laporan keuangan perpajakan PT. Sarwa Karya Wiguna

5.2 Saran

Peneliti mengemukakan saran-saran yang bermanfaat bagi perusahaan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang, sebaiknya pajak PT. Sarwa Karya Wiguna Palembang harus mematuhi peraturan perpajakan untuk menghindari sanksi pajak. Untuk peneliti selanjutnya untuk menganalisis besarnya pajak penghasilan yang terutang diharapkan agar dapat menggunakan lebih dari 1 tahun bisa memperoleh hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2010. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2010. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 2 Revisi Jakarta: Salemba Empat
- Anwar Sanusi, 2011, *Metode Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta
- Erly Suandy. 2013. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat : Jakarta
- Edy. 2016. *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada PT. Satu Cita Protenza Tahun 2014*. Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani. Volume 3, No. 1. ISSN 2355-309X.
- Gindo M. Sigalingging (2010) *Rekonsiliasi Laporan Keuangan Untuk Menghitung PPh Terutang pada PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan*
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. *Pernyataan Standar Keuangan 01 : Penyajian Laporan Keuangan (Revisi 2013)*. Jakarta : IAI
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.